

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

Selva Temalagi¹,
Revi W. Silooy²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh: 1) akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance*, 2) transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance*, dan 3) partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance*. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan masyarakat Desa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kriteria dalam teknik pengambilan sampel ini adalah: 1) Para aparat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, 2) masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari perolehan hasil isian kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan strategi opini (opinion), yaitu data yang dikumpulkan melalui pendapat-pendapat responden terkait dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana desa. Analisis data menggunakan analisis regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, 2) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, 3) Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan *Good Governance*

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa, *Good Governance*

Abstract

This study aims to empirically examine the effects of: 1) accountability for village fund management to realize good governance, 2) transparency in village fund management to realize good governance, and 3) participation in village fund management to realize good governance. This research was conducted in villages in the Aru Islands District, Aru Islands Regency. The samples in this study were government officials and village communities. The sampling technique in this study used the Purposive Sampling technique. The criteria in this sampling technique are: 1) Village officials who are directly involved in managing village funds, 2) communities participating in supervising the management of village funds. Consists of the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Planning and Community Affairs. The data used in this study are primary data sourced from the results of the questionnaires distributed to respondents. The data collection technique used in this research is a questionnaire survey with an opinion strategy, namely data collected through the opinions of respondents related to accountability, transparency, participation and management of village funds. Data analysis using multiple regression analysis. The results show: 1) Accountability has a significant effect on the management of village funds, 2) Transparency has a significant effect on the management of village funds, 3) Participation has a significant effect on the management of village funds, to realize Good Governance.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Village Fund Management, *Good Governance*

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: selva_temalagi@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: silooyrevy78@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP. Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari atas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki 89 pulau yang berpenghuni dari 187 pulau dengan jumlah desa sebanyak 80 desa, dengan kualifikasi desa sangat tertinggal dan tertinggal. Masalah pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Aru sebagian besar adalah penumpukan di batas akhir pengajuan setiap tahapnya diakibatkan karena kegiatan yang tidak diselesaikan (mangkrak, fiktif) sehingga laporan pertanggungjawaban tidak bisa dilaporkan tepat pada waktunya dan masalah kapasitas sumber daya manusia pengelola dana desa yang masih kurang sehingga memperlambat proses penyaluran dana desa..

Penelitian ini pernah dilakukan Weny Ultafian (2017). Pada penelitian kali ini akan membahas dan menganalisa kembali akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan karakteristik daerah yang berbeda serta keadaan atau kondisi yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian pengelolaan dana desa ini sangat penting bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas, dan dapat bermanfaat bagi setiap pengambil kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa di desa-desa di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan pada penelitian ini adalah: 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance?, 2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance? dan 3) Apakah partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh: 1) akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance, 2) transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance, dan 3) partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance.

Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan principals.

Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) menunjukkan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Van Slyke (2006) juga menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai steward karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori *stewardship* diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

Transparansi

Menurut Ultrafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan

organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman, Suwandi dan Hamid, 2015). Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

Partisipasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Definisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Good Governance

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (*World Bank*, 1992a).

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa Good Governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima

oleh seluruh masyarakat. Good Governance pada dasaenya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015:9).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian (M. Haris Sirajudin, 2019) dengan judul pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan memperoleh kesimpulan bahwa Akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa signifikan berpengaruh terhadap Good Governance. Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance

Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat di kontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Utafitah tahun 2017 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat membuktikan bahwa transparansi positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di kecamatan Merapi Barat. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis :

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance.

Pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance

Partisipasi yang berarti setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing (UNDP). Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Surnaryadi, 2010 ; 46 dalam Wenu Utafiah 2017)

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlihat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan juga ide masyarakat dapat di salurkan dan dipenuhi dengan baik.

Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang

efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat kompak guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis :

H3: Partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada desa–desa di wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Populasi dalam penelitian ini adalah desa di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan masyarakat di Desa-Desa pada Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yang menjadi kriteria dalam teknik pengambilan sampel ini adalah: 1) Para aparat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, 2) masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari perolehan hasil isian kuesioner yang disebarakan kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan strategi opini (opinion), yaitu data yang dikumpulkan melalui pendapat – pendapat responden terkait dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana desa.

Analisis data dilakukan dengan melakukan beberapa uji, antara lain :

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan disytribusi) (Ghozali,2013).

Uji Kualitas Data: a) Uji Validitas, Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penerlitan. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). b) Uji Realibilitas, Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian.

Uji Asumsi Klasik: 1) Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melihat tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Jika *probability asymp.sig (2tailed)* > 0,05 maka data mempunyai distribusi yang normal. 2) Uji Multikolonieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai dari VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10. 3) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu atau berkumpul disatu sisi atau dekat

nilai 0 pada sumbu Y pada kurva yang dihasilkan saat menggambarkan kurva dengan SPSS, maka terjadi heteroskedasitas. Jika titik-titik data menyebar tidak secara beraturan maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji Hipotesis, Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Model Regresi Linear Berganda untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Standar eror

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi

Y = Pengelolaan Dana Desa

Uji Koefisien Determinasi, bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji Parsial, Uji t (uji Parsial) digunakan untuk mengetahui variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika t hitung > t tabel atau sig < 0,05 maka hipotesis diterima atau ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang disebarkan kepada responden. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara survey dengan tujuan untuk memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut diisi oleh responden dan dikumpulkan dikembali setelah selang waktu yang ditentukan. Terdapat 65 kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, yang kembali sebanyak 53 buah kuesioner dan ditemukan 3 yang cacat/rusak.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian, sebab dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini.

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, pendidikan dan usia serta pengalaman seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Karakteristik Responden

| Keterangan | Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Jenis Kelamin | Pria | 34 | 68.00% |
| | Wanita | 16 | 32.00% |
| | Total | 50 | 100% |
| Umur | < 20 Tahun | | |

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| | 20-35 Tahun | 2 | 4.00% |
| | 36-50 Tahun | 31 | 62.00% |
| | > 50 Tahun | 17 | 34.00% |
| | Total | 50 | 100% |
| Pendidikan | D3 | 15 | 30.00% |
| | Sarjana | 9 | 18.00% |
| | Magister | - | - |
| | Doktor | - | - |
| | Lainnya | 26 | 52.00% |
| | Total | 50 | 100% |
| Lama Kerja | < 1 Tahun | | |
| | 1-5 Tahun | 10 | 20.00% |
| | 5-10 Tahun | 25 | 50.00% |
| | > 10 Tahun | 15 | 30.00% |
| | Total | 50 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jawaban responden penelitian terhadap variabel-variabel penelitian yang yang terdiri dari nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi. Adapun perincian statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Akuntabilitas (X1) | 50 | 48 | 68 | 58.80 | 4.982 |
| Transparansi (X2) | 50 | 66 | 105 | 85.82 | 7.837 |
| Partisipasi (X3) | 50 | 39 | 52 | 46.42 | 3.111 |
| Pengelolaan DD (Y) | 50 | 21 | 35 | 27.94 | 3.184 |
| Valid N (listwise) | 50 | | | | |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Data pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang berupa tanggapan berkaitan dengan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa. Interpretasi data penelitian berdasarkan tabel 2 sebagai berikut:

1. Data mengenai variabel akuntabilitas, melalui kuesioner yang terdiri dari 15 (lima belas) pernyataan dengan 5 (lima) alternatif jawaban (1, 2, 3, 4 dan 5), dimana diperoleh nilai minimum 48, maksimum 68, mean 58.80, dan deviasi standarnya 4.982.
2. Data mengenai variabel transparansi, melalui kuesioner yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) pernyataan dengan 5 (lima) alternatif jawaban (1, 2, 3, 4 dan 5), dimana diperoleh nilai minimum 66, maksimum 105, mean 85.82, dan deviasi standarnya 7.837.
3. Data mengenai variabel partisipasi, melalui kuesioner yang terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan dengan 5 (lima) alternatif jawaban (1, 2, 3, 4 dan 5), dimana diperoleh nilai minimum 39, maksimum 52, mean 46.62, dan deviasi standarnya 3.111.

4. Data mengenai variabel pengelolaan dana desa, melalui kuesioner yang terdiri dari 7 (tujuh) pernyataan dengan 5 (lima) alternatif jawaban (1, 2, 3, 4 dan 5), dimana diperoleh nilai minimum 21, maksimum 35, mean 27.94, dan deviasi standarnya 3.184.

Uji Validitas

Untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner, penulis melakukan *bivariate correlation*. Jika nilai *pearson correlation* untuk tiap indikator ≥ 0.3 pada taraf signifikan $< 5\%$ (0.05) maka indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk variabel-variabel penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel | Indikator Variabel | Hasil Pengujian | | Kesimpulan |
|---------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| | | Pearson Correlation | Signifikan | |
| Pengelolaan Dana Desa (Y) | Y1.1 | 0.812 | 0.000 | Valid |
| | Y1.2 | 0.810 | 0.000 | Valid |
| | Y1.3 | 0.642 | 0.000 | Valid |
| | Y1.4 | 0.747 | 0.000 | Valid |
| | Y1.5 | 0.580 | 0.000 | Valid |
| | Y1.6 | 0.565 | 0.000 | Valid |
| | Y1.7 | 0.559 | 0.000 | Valid |
| Akuntabilitas (X1) | X1.1 | 0.757 | 0.000 | Valid |
| | X1.2 | 0.333 | 0.018 | Valid |
| | X1.3 | 0.531 | 0.000 | Valid |
| | X1.4 | 0.529 | 0.000 | Valid |
| | X1.5 | 0.435 | 0.002 | Valid |
| | X1.6 | 0.442 | 0.001 | Valid |
| | X1.7 | 0.757 | 0.000 | Valid |
| | X1.8 | 0.446 | 0.001 | Valid |
| | X1.9 | 0.507 | 0.000 | Valid |
| | X1.10 | 0.358 | 0.011 | Valid |
| | X1.11 | 0.574 | 0.000 | Valid |
| | X1.12 | 0.579 | 0.000 | Valid |
| | X1.13 | 0.398 | 0.004 | Valid |
| | X1.14 | 0.655 | 0.000 | Valid |
| | X1.15 | 0.511 | 0.000 | Valid |
| Transparansi (X2) | X2.1 | 0.686 | 0.000 | Valid |
| | X2.2 | 0.617 | 0.000 | Valid |
| | X2.3 | 0.721 | 0.000 | Valid |
| | X2.4 | 0.564 | 0.000 | Valid |
| | X2.5 | 0.655 | 0.000 | Valid |
| | X2.6 | 0.697 | 0.000 | Valid |
| | X2.7 | 0.573 | 0.000 | Valid |
| | X2.8 | 0.466 | 0.001 | Valid |
| | X2.9 | 0.698 | 0.000 | Valid |
| | X2.10 | 0.619 | 0.000 | Valid |
| | X2.11 | 0.748 | 0.000 | Valid |
| | X2.12 | 0.583 | 0.000 | Valid |
| | X2.13 | 0.444 | 0.001 | Valid |
| | X2.14 | 0.362 | 0.010 | Valid |
| | X2.15 | 0.451 | 0.001 | Valid |
| | X2.16 | 0.361 | 0.010 | Valid |
| | X2.17 | 0.339 | 0.016 | Valid |
| | X2.18 | 0.596 | 0.000 | Valid |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | X2.19 | 0.385 | 0.006 | Valid |
| | X2.20 | 0.734 | 0.000 | Valid |
| | X2.21 | 0.570 | 0.000 | Valid |
| | X2.22 | 0.562 | 0.000 | Valid |
| Partisipasi (X3) | X3.1 | 0.501 | 0.000 | Valid |
| | X3.2 | 0.630 | 0.000 | Valid |
| | X3.3 | 0.658 | 0.000 | Valid |
| | X3.4 | 0.586 | 0.000 | Valid |
| | X3.5 | 0.525 | 0.000 | Valid |
| | X3.6 | 0.392 | 0.005 | Valid |
| | X3.7 | 0.442 | 0.001 | Valid |
| | X3.8 | 0.380 | 0.007 | Valid |
| | X3.9 | 0.325 | 0.021 | Valid |
| | X3.10 | 0.499 | 0.000 | Valid |
| | X3.11 | 0.351 | 0.013 | Valid |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | Pengelolaan Dana Desa (Y) | 0.802 | Reliabel |
| 2 | Akuntabilitas (X1) | 0.786 | Reliabel |
| 3 | Transparansi (X2) | 0.891 | Reliabel |
| 4 | Partisipasi (X3) | 0.656 | Reliabel |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikan diatas 0.05 maka residual data berdistribusi normal. Hasil uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 50 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.75786300 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .118 |
| | Positive | .118 |
| | Negative | -.080 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .831 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .494 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Hasil uji normalitas dengan menggunakan statistik *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai Asymp. sig (2-tailed) $0.494 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji Multikolinearitas data penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collinearity Statistics | |
|----------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Pengawasan Fungsional (X1) | 0,553 | 1,810 |
| Akuntabilitas Publik (X2) | 0,559 | 1,789 |
| Gaya Kepimimpinan (X3) | 0,916 | 1,091 |

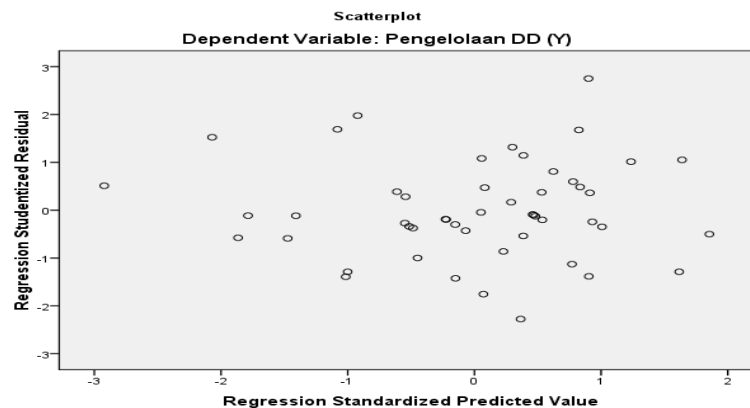
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen adalah $> 0,10$ yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Demikian halnya dengan melihat nilai VIF, ketiga variabel independen adalah < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dalam model regresi tidak terjadi korelasi yang kuat atau bebas gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Dari grafik *scatterplot*, jika titik-titik menyebar secara (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas data penelitian disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Grafik *scatterplot* pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi

Pada penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *Adjust R Square* yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|
| 1 | .834 ^a | .695 | .675 | | 1.814 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Nilai *adjusted R²* berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 0,675 yang bernilai positif, hal ini mengindikasikan bahwa pengujian memberikan hasil yang baik dimana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang dibangun.

Uji T (Parsial)

Hasil uji T dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Hasil Uji T (Parsial)

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -10.881 | 4.469 | | -2.435 | .019 |
| | Akuntabilitas (X1) | .203 | .070 | .317 | 2.897 | .006 |
| | Transparansi (X2) | .208 | .044 | .512 | 4.700 | .000 |
| | Partisipasi (X3) | .195 | .087 | .191 | 2.241 | .030 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -10.881 + 0.203X1 + 0.208X2 + 0.195X3$$

Hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas (X1) mempunyai nilai signifikan $0,006 < 0,05$, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel transparansi (X2) mempunyai nilai signifikan $0,000 < 0,05$, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel partisipasi (X3) mempunyai nilai signifikan $0,030 < 0,05$, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila proses dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern dan ekstern maka dapat menciptakan praktek pengelolaan dana desa yang sehat. Selain itu, proses penetapan program-program dan pelaksanaan dana desa harus dirancang dengan memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran dan mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku sehingga dapat tercipta perencanaan dan pelaksanaan program dana desa yang akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama, agar supaya dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan pemerintah desa harus mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional melalui laporan pertanggungjawaban dan memiliki dokumen tertulis terkait penggunaan dana Desa. Sejalan dengan pemikiran diatas, hasil penelitian (M. Haris Sirajudin, 2019) memperoleh kesimpulan bahwa Akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa signifikan berpengaruh terhadap Good Governance.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila informasi tentang keuangan dana desa baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dapat diakses dengan mudah dan tidak berbelit-belit oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya maka dapat tercipta pengelolaan dana desa yang transparan. Selain itu, pemerintah desa harus terbuka dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan secara transparan (terbuka) baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan. Pemerintah Desa/Negeri perlu menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah dan mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepadanya serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa maka dapat tercipta pengelolaan dana desa yang transparan. Sejalan dengan pemikiran diatas, Weny Utafitah (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila pemerintah Desa/Negeri memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan ikut serta dalam Musrenbang desa menentukan kegiatan yang berhubungan dengan dana desa, mulai dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan program program yang berkaitan dengan dana desa serta usul dan saran dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran maka dapat tercipta praktek pengelolaan dana desa yang sehat. Selain itu, pemerintah Desa/Negeri juga perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui jalannya pelaksanaan penggunaan dana desa dengan menyediakan informasi secara terbuka dan didukung dengan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan serta melibatkan masyarakat mengikuti perkembangan pelaksanaan program untuk dapat melakukan evaluasi bersama dengan tim pengelola dana desa. Maka hal ini akan menciptakan pengelolaan dana desa yang sehat dan bermanfaat kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa .
2. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa .
3. Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik wawancara atau mengembangkannya dengan melakukan penggabungan antara jenis penelitian kuantitatif dengan teknik kuesioner dan jenis penelitian kualitatif dengan teknik wawancara (*mix*).
3. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat meneliti pada objek lainnya
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus meningkatkan kinerjanya terutama dengan menempatkan pegawai yang memenuhi syarat dan berkompeten dalam bidangnya.
5. Agar dapat terlaksana tujuan sesuai dengan yang di harapkan oleh pimpinan maka sebaiknya pimpinan dalam suatu OPD harus mampu memberikan motivasi kepada bawahan dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah yang dipimpinnya.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait keseluruhan aspek manajemen kinerja yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam merencanakan, mengukur dan melaporkan serta melakukan evaluasi atas kinerja sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

REFERENSI

- Ardiyanti, Rika. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang*
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, 2017. *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki>, Kabupaten Kepulauan Aru-Wikipedia Bahasa Indonesia.
<https://kaparukab.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru.
- Jubaedah, dkk. *Model Pengukuran pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bandung*: PKP2AILAN,2008.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga. Cetakan Pertama Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya : Airlangga University Press.

Ultafitah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.